

ABSTRAK

Majelis Pengawas Daerah (MPD) berperan penting menjaga kualitas jabatan Notaris melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Namun, keterbatasan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana menyebabkan fungsi pengawasan belum optimal. Peningkatan aktivitas hukum di Kota Semarang menuntut strategi penguatan MPD agar efektif, profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan integritas dan kualitas layanan kenotariatan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan hukum.

Perumusan Masalah dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas pengawasannya di Kota Semarang serta mengetahui dan menganalisis strategi penguatan Majelis Pengawas Daerah dalam meningkatkan kualitas jabatan Notaris di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non-doktrinal empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat gabungan antara deskriptif-preskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan, teori kelembagaan, dan teori manajemen sumber daya manusia.

MPD Semarang menghadapi kendala normatif, internal, dan eksternal yang menghambat efektivitas pengawasan Notaris, berdampak pada kualitas jabatan. Penguatan diperlukan melalui inovasi digital, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi SDM, perluasan kewenangan sanksi, serta dukungan anggaran dan sarana agar pengawasan lebih profesional, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

MPD menghadapi kendala normatif, internal, eksternal; penguatan melalui regulasi, SDM, anggaran, digitalisasi, dan partisipasi publik diperlukan meningkatkan kualitas Notaris jabatan.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Kualitas Jabatan Notaris; Kota Semarang; Strategi Penguatan.

ABSTRACT

Majelis Pengawas Daerah (MPD) plays a crucial role in maintaining the quality of the notarial profession through continuous guidance and supervision. However, institutional limitations, constraints in human resources, limited budget allocation, and inadequate facilities have prevented the supervisory function from operating optimally. The increasing volume of legal activities in Semarang City necessitates strategies to strengthen MPD so that it can function effectively, professionally, and accountably, while enhancing the integrity and quality of notarial services in a sustainable and legally equitable manner.

The research problems and objectives are directed at identifying and analyzing the obstacles faced by MPD in performing its supervisory duties in Semarang, as well as examining strategies for strengthening MPD to improve the quality of the notarial profession in the city.

This study employs a non-doctrinal empirical approach with a combined descriptive–prescriptive research design. Data were collected through interviews. The theoretical frameworks applied include supervision theory, institutional theory, and human resource management theory.

MPD Semarang faces normative, internal, and external challenges that hinder the effectiveness of notarial supervision and impact professional quality. Strengthening efforts include digital innovation, risk-based supervision, enhancement of human resource competence, expansion of sanctioning authority, and improved budgetary and infrastructural support to ensure more professional, efficient, accountable, and sustainable oversight.

Keywords: *Majelis Pengawas Daerah; Notary; Quality of Notary Profession; Semarang City; Strengthening Strategy.*